Artikel di Koran Investor Daily 4 Februari 2021

INVESTOR DAILY INDONESIA

Editor In Chief : **Primus Dorimulu**

Editor at Large : **John Riady**

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

TAJUK

Kejar Target *Lifting* Minyak 1 Juta BPH

Pemerintah telah menetapkan target produksi minyak yang siap dijual atau *lifting* sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030. Sedangkan produksi gas ditargetkan sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (*billion standard cubic feet per day*/BSCFD). Sejumlah strategi pun sudah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Bahkan insentif siap ditebar untuk menarik investor masuk ke sektor hulu migas.

Target *lifting* minyak 1 juta bph harus diwujudkan untuk menjamin pasokan energi di masa mendatang seiring kebutuhan energi yang terus meningkat. Meski kelak akan ada kendaraan listrik, BBM tetap diperlukan untuk menopang kelancaran transportasi laut dan udara. Tak hanya untuk sektor transportasi, peningkatan produksi migas juga diperlukan untuk menopang pertumbuhan industri nasional di masa depan, selain memangkas defisit neraca perdagangan.

Saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu bph dari total kebutuhan sekitar 1,6 juta bph. Artinya masih ada kekurangan pasokan 900 ribu hingga 1 juta bph yang harus dipenuhi dari impor. Karena itu, peningkatan produksi minyak diperlukan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan migas yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk menekan defisit, mau tak mau volume produksi minyak harus dinaikkan secara signifikan.

Produksi minyak 1 juta bph dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kilang bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Dengan beroperasinya sejumlah proyek kilang PT Pertamina (Persero), yakni pembangunan Kilang Tuban dan perbaikan serta peningkatan kapasitas (*revamping*) Kilang Balikpapan, Cilacap, Balongan, Plaju, dan Dumai, Indonesia akan kelebihan pasokan BBM pada tahun 2029-2030.

Untuk mencapai target produksi minyak 1 juta bph, ada empat strategi yang disiapkan pemerintah. Pertama, mendorong kegiatan eksplorasi yang masih baik di blok migas produksi maupun di area terbuka. Apalagi, Indonesia memiliki lebih dari 50 cekungan migas yang belum dieksplorasi. Kedua, penerapan *enhanced oil recovery* (EOR) atau pengurasan minyak tahap lanjut di lapangan yang sudah dikembangkan.

Ketiga, percepatan dalam mengubah cadangan menjadi produksi (*reserve to production*/R-to-P) yang juga akan menghasilkan tambahan produksi cukup besar. Sedangkan strategi keempat yakni mendorong pengembangan kembali lapangan migas produksi yang telah ditinggalkan atau *undeveloped field*.

Tak hanya strategi, pencapaian target produksi minyak 1 juta bph ini perlu dukungan perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Pertamina yang akan memegang peranan besar dalam mencapai target tersebut. Sekitar 70% dari target 1 juta bph akan dikontribusi BUMN energi ini.

Di saat harga minyak mentah masih tertekan seperti sekarang ini, perbaikan iklim investasi migas sangat diperlukan guna menarik investor. Caranya yakni melalui pemberian insentif. Pemerintah sudah menawarkan insentif kepada perusahaan migas berupa *domestic market obligation* (DMO) *holiday*, *investment credit*, percepatan depresiasi, hingga perpajakan.

Dari sembilan insentif yang diusulkan SKK Migas bersama perusahaan migas, sudah lima insentif diimplementasikan. Beberapa insentif ini yakni penundaan pencadangan dana pascatambang, penundaan atau penghapusan PPN gas alam cair (*liquefied natural gas*/LNG), penggunaan barang milik negara tidak dikenakan sewa, dan harga gas diskon untuk pemakaian di atas batas *Take or Pay* (TOP). Selain itu, pemerintah siap memberikan fleksibilitas fiskal seperti percepatan depresiasi, perubahan split sementara, dan kewajiban pasok dalam negeri (*domestic market obligation*/DMO) harga penuh.

Sementara insentif yang belum diimplementasikan adalah pembebasan pajak (*tax holiday*), penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak, penundaan atau pengurangan hingga 100% dari pajak-pajak tidak langsung bagi blok eksploitasi, serta percepatan depresiasi untuk kurun waktu tertentu. Insentif-insentif tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

> Di saat harga minyak mentah masih tertekan seperti sekarang ini, perbaikan iklim investasi migas sangat diperlukan guna menarik investor.

Tak hanya insentif, perusahaan migas diberi kebebasan untuk memilih jenis kontrak kerja sama (*production sharing contract*/PSC) yang digunakan. Pilihannya ada dua, yakni bagi hasil kotor (*gross split*) atau investasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*). Sejauh ini, perusahaan migas cenderung lebih memilih *cost recovery*.

Kelebihannya memilih jenis kontrak migas ini akan digunakan dalam lelang 10 blok migas tahun ini. Sejumlah perusahaan migas telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak lima blok migas akan ditawarkan melalui lelang reguler, yakni Blok Merangi III, Sekayu, North Kangean, Offshore Cendrawasih, dan Mamberamo. Sedangkan lima blok lainnya dilelang melalui penawaran langsung, yaitu West Palmerah, Liman, Rangkas, Bose, dan Maratua II.

Perusahaan migas wajar mendapatkan banyak tawaran insentif. Selain nilai investasi yang ditanamkan cukup besar, risiko yang ditanggung investor pun tidak sedikit jika gagal pada tahap eksplorasi. Insentif akan menjadi pemikat bagi perusahaan migas yang sedang menghadapi penurunan penjualan serta harga minyak mentah yang belum mencapai keekonomian sehingga berdampak pada pendapatan di sektor hulu. ❐

POJOK IDE

Anggota DPR minta pemerintah memperkuat aspek penegakan hukum reklamasi lubang tambang.
Tegas laksanakan aturan.

Anggota DPR: Setop aktivitas eksploitasi SDA yang tidak mendukung terwujudnya ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Fenomena bencana alam mesti jadi cerminan untuk introspeksi.

Mengatasi Ketidakadilan Pembangunan Kelautan

Pembangunan kelautan di Indonesia telah berlangsung nyaris enam dekade. Sepanjang perjalanannya aneka ketidakdilan sosial menyeruak. Korbannya acapkali masyarakat pesisir (nelayan), komunitas adat, dan perempuan pesisir.

Oleh **Muhamad Karim** *)

■ Muhamad Karim

Memang, mereka komunitas rentan. Pasalnya, kehidupan sosial ekonominya bergantung sumber daya kelautan khususnya perikanan. Bila sumberdaya perikanan terkuras tanpa kendali, otomatis mereka bakal alami kemiskinan struktural dan marginalisasi.

Pendek kata pembangunan kelautan yang eksploitatif dan mengabaikan ekologi bakal mengorbankan mereka. Imbasnya, kesejahteraan bakal jauh panggang dari api kehidupannya. Sebaliknya, mereka alami keterpurukan sosial ekonomi yang berkelindan dengan degradasi sumber daya dan kerusakan ekologi. Dari sinilah asal mula ketidakadilan sosial dan ekologi.

Ketidakadilan

Sebuah riset terbaru yang dipublikasikan Jurnal *Marine Policy* mengungkapkan ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan kelautan (Bennet et al 2021). Meskipun riset ini bersumber dari pustaka jurnal dan referensi relevan lainnya, akan tetapi bisa mengungkapkan secara gamblang ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan kelautan.

Memang praksisnya, pembangunan kelautan di dunia ini muncul dalam aneka terma. Mulai dari ekonomi biru (*blue economy*), pertumbuhan biru (*blue growth*), hingga ekonomi kelautan (*ocean economy*). Mencermati hal itu, Bennet et al (2021) dan tim dari Institute for the Ocean and Fisheries, University of British Columbia melacak dan me-*review* ragam pustaka menggunakan media *Web of Science* dan *Google Scholar*. Dalam pencarian mereka menggunakan frasa: (a) keadilan sosial (*social justice*), keadilan lingkungan (*environmental justice*), kesetaraan sosial (*social equity*) dan dampak sosial (*social impact*).

Kemudian, (b), dikombinasikan dengan lautan (*ocean*), laut (*marine*), pantai (*coast*); dan, (c) pertumbuhan biru (*blue growth*), ekonomi biru (*blue economy*), pembangunan kelautan (*ocean development*) atau aneka sektor ekonomi kelautan lainnya. Di antaranya: perikanan (*fisheries*), akuakultur (*aquaculture*), budidaya laut (*marine culture*), pariwisata (*tourism*), pertambangan (*mining*), minyak (oil), energi terbarukan (*renewable energy*), desalinasi (*desalination*), karbon biru (*blue carbon*), pembangunan pelabuhan (*port development*), dan pangapalan (*shipping*).

Mereka sukses mendapatkan 312 pustaka dan menemukan 10 potensi sumber ketidakadilan sosial dan lingkungan dalam pembangunan kelautan. Temuan penting bagi penulis untuk mengkonstruksi dan mengontekstualisasikan dengan fenomena ketidakadilan dalam pembangunan kelautan di Indonesia. *Pertama*, perampasan, perpindahan alokasi serta perampasan sumber daya kelautan. Fakta empirisnya, yakni kasus penyerobotan lahan warga Pulau Pari, perampasan ruang hidup nelayan Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali akibat reklamasi.

Kedua, pencemaran dan buangan limbah yang memproduksi ketidakadilan lingkungan/ekologi. Munculnya, pencemaran minyak di Teluk Balikpapan (2018) dan pesisir Karawang (2019), hingga buangan limbah industri dan rumah tangga nyaris berlangsung di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Buangan limbah mengandung logam berat merkuri (Mg) dan timbal (Pb) di perairan memicu kematian massal ikan di wilayah pesisir seperti Teluk Jakarta. Bukankah korbannya masyarakat pesisir dan ekologi itu sendiri?

Ketiga, degradasi lingkungan dan menipisnya penyediaan jasa ekosistem. Dampaknya ialah berkurangnya suplai jasa ekosistem berupa pangan, air, kayu, perlindungan banjir, pengendalian erosi, mitigasi tsunami, penyediaan benih, kawasan suaka margasatwa, terganggunya siklus nutrien maupun produksi primer perairan hingga menggerus warisan budaya, nilai-nilai rekreasi hingga pendidikan. Ragam perilaku destruktif manusia jadi sebabnya (antroposentris) ialah deforestasi mangrove, dan pengambilan karang ilegal, pengerukan pasir laut buat reklamasi hingga eksploitasi benih lobster.

Keempat, berdampak terhadap mata pencaharian nelayan skala kecil. Megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa, penguasaan pulau kecil oleh asing buat wisata bahari acapkali menutup akses sumber daya bagi nelayan skala kecil. Fenomena ini berimbas pada kemerosotan mata pencahariannya. Mereka kian sulit menangkap ikan akibat wilayah tangkapannya tambah jauh, sementara ukuran perahu/kapalnya tak lebih dari 5 GT. Begitu pula, rencana pemerintah Indonesia hendak menerapkan sistem kuota di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI). Rencana ini berpotensi meminggirkan sumber mata pencaharian nelayan skala kecil (tradisional) yang memicu ketidakadilan.

> Paradigma "*degrowth*" menjamin kesehatan lingkungan dan tak mereproduksi ketidakadilan sosial dalam bidang kelautan secara meyeluruh. Akhirnya tercipta kesejahteraan berkelanjutan.

Kelima, hilangnya akses terhadap sumber daya kelautan buat menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan. Fenomena ini bakal terjadi karena: (i) merusak akses formal dan hak pemanenan sumber daya bagi masyarakat lokal dan adat, 2) tingginya persaingan dan perebutan ruang/wilayah serta sumber daya kelautan, dan 3) adanya pengaruh dan penghambat masyarakat mengakses sumber daya yang dikonstruksi lewat mekanisme spasial, fisik, kelembagaan, peraturan, keuangan, kapasitas, dan sosial. Salah satu contohnya, terbitnya PermenKP No 59/2020 yang membolehkan alat tangkap merusak (*trawl* dan cantrang) kembali beroperasi. Bukankah ini memicu perebutan wilayah tangkap, dan konflik antarnelayan?

Keenam, distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Distribusi manfaat ekonomi akibat pemanenan sumber daya dan pembangunan berbasis kelautan ternyata memproduksi ketidakadilan global. Nyatanya 47% paten sumber daya genetik kelautan dikuasai satu perusahaan dan 98% pelakunya hanya 10 negara (Blasiak et al 2018). Mirisnya lagi, negara-negara kaya di dunia ini mendominasi penangkapan ikan global di laut lepas hingga 98% dan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik negara berpenghasilan rendah mencapai 78% (McCauley, 2018).

Ketujuh, berdampak secara sosial dan budaya. Pengembangan wisata bahari pulau-pulau kecil di Indonesia memproduksi ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat/lokal yang ditandai hilangnya akses terhadap sumber daya, adanya perpindahan penduduk, kehilangan agensi, dan redupnya kohesi sosial masyarakat (Hampton dan Julia 2015).

Kedelapan, marginalisasi perempuan. Dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Indonesia ternyata partisipasi perempuan acapkali dikesampingkan (Ismail 2015). Akibatnya, dalam proses konsultasi, pengambilan keputusan hingga pemetaannya, posisi mereka rentan alami risiko kehilangan akses sumber daya andalan buat menopang kehidupannya (Josse et al 2019). Padahal pemanfaatan dan akses terhadap sumber daya kelautan amat mempertimbangkan kesetaraan gender yang dikonstruksi lewat akses permodalan, aset, maupun pengetahuan (Hapke, 2017).

Kesembilan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat lokal. Kasus kematian dan perbudakan anak buah kapal (ABK) kapal ikan asing asal Indonesia bekerja di kapal Tiongkok, Taiwan, Korean Selatan hingga Selandia Baru adalah faktanya. Mereka alami perlakuan tidak manusiawi. Bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja, beban kerja berlebihan, upah tidak dibayar, penganiayaan fisik, pengurangan hingga dugaan pembunuhan. Bukankah ini bentuk perbudakan modern dan melanggar HAM? (Simmon et al 2014).

Kesepuluh, mengabaikan partisipasi pemangku kepentingan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola kelautan dan perikanan. Penyebabnya, prosesnya kurang transparan, dan lemahnya penyebaran informasi berpotensi timbul ketidakadilan sosial. Contohnya, tatkala menyusun rencana tata ruang laut di berbagai daerah acapkali pemangku kepentingan utama seperti nelayan, masyarakat adat/lokal dan perempuan pesisir diabaikan.

Rekomendasi Solusi

Hasil riset ini juga merekomendasikan 10 solusi untuk mewujudkan "keadilan biru" (*blue justice*) dalam pembangunan kelautan berorientasi pertumbuhan biru. Yakni: (i) mengakui dan melindungi sumberdaya, baik terunial spasial dan hak akses; (ii) menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam mengurangi polusi dan menjamin bahwa beban lingkungan tidak menimpa populasi yang terpinggirkan.

Kemudian (iii), meminimalisasi dampak pembangunan terhadap habitat, sumberdaya, dan jasa ekosistem; (iv), mempertimbangkan dan menjaga hak akses dan mata pencaharian nelayan skala kecil; (v) menjaga dan mempromosikan akses terhadap sumber daya kelautan yang buat jaminan ketahanan pangan dan kesejahteraan.

Selanjutnya (vi), mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang menjamin manfaat ekonomi terdistribusi merata; (vii) memantau, memitigasi dan mengelola dampak sosial serta budaya dari pembangunan kelautan; (viii) mengakui, dan mempromosikan kesetaraan yang melibatkan perempuan dalam ekonomi kelautan; (ix) mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan masyarakat lokal/adat; serta, (x) mengembangkan proses perencanaan dan tata kelola yang inklusif serta partisipatif dalam pembangunan kelautan (Bannet et al 2021).

Sayangnya, Bennet et al (2021) dan timnya pesimistis mampu menterjemahkan/masikan 10 tawaran solusi lewat paradigma "pertumbuhan biru" buat mencapai keadilan biru (*blue justice*). Makanya, mereka mengusulkan juga pemikiran kreatif dan alternatif agar jadi solusi radikal dalam pembangunan kelautan. Supaya mewujudkan keadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan kelautan.

Salah satunya adalah paradigma *degrowth*, apalagi dalam situasi wabah Covid-19. Sebuah anti tesis kegagalan pertumbuhan (*growth*) untuk menciptakan kesejahteraan sekaligus keberlanjutan sumber daya alam dan ekologinya. Prosesnya kolektif-deliberatif yang mengendalikan mekanisme pasar serta menjamin pertukaran barang dan jasa secara adil dalam kehidupan manusia (Schneider et al, 2013). *Dus*, memprioritaskan jaminan kualitas hidup manusia ketimbang kuantitas, dan kooperatif ketimbang kompetisi (Latouche, 2003). Secara ekologi-ekonomi bakal menjamin keberlanjutan sosial dan mengatasi ketidakadilan ekonomi (Kallis, 2010).

Menjamin pula keberlanjutan ekologis, pengelolaan ekonomi secara partisipatif, memenuhi kebutuhan dasar dan kualitas hidup manusia secara baik hingga mewujudkan keadilan distributif ruang maupun sumber daya (Research and Degrowth, 2010). Pendek kata, paradigma "*degrowth*" menjamin kesehatan lingkungan dan tak mereproduksi ketidakadilan sosial dalam bidang kelautan secara meyeluruh. Akhirnya tercipta kesejahteraan berkelanjutan. Semoga!

*) *Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim/Dosen Universitas Trilogi Jakarta.*

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS | Impacting Lives Through News You Can Trust

Dewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua) Markus Parmadi, Didik J Rachbini, Samuel Tahir

MANAGEMENT:
Chief Operating Officer: Anthony Wonsono. **Finance Director:** Lukman Djaja. **News Director:** Primus Dorimulu
Senior Advisor: Samuel Tahir

INVESTOR DAILY INDONESIA

Penerbit: PT Koran Media Investor Indonesia

Wakil Pemimpin Redaksi: Hari Gunarto **Redaktur Pelaksana:** Abdul Aziz, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Ester Nuky URS, Nurjoni
Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Fransiscus Rio Winto, Harso Kurniawan, Iwan Subarkah, Imam Suhartadi, Jauhari Mahardhika, Nasori, Totok Hari Subagyo, Thomas E. Harefa, Tri Murti, Tri Listyarini, U. Hari Gagarin (Foto), **Asisten Redaktur:** Arts Cahyadi, Ely Rahmawaty, Eva Fitriani, Happy Amanda Amalia, Kunradus Aliandu, Mardiana Maikman, Parluhutan Situmorang, Retno Ayuningrjyas. **Staf Redaksi:** Arnoldus Kristianus, Emanuel Kure, Imam Mudzakir, Indah Handayani, Leonard Al, Cahyoputra, Novy Lumanauw, Ridho Syukra, Thresa Sandra Desfika, Trisyn Pengestuti, Farid Firdaus, Gita Roosiana, Nabil Syarifudin Al Faruq, Muhammad Ghafur Fadillah, Nida Sahara, Prisma Ardianto, Grace Eldora Sinaga, Rangga Ambar Prakoso. **Wartawan Foto:** David Gita Roza, Emral Firdansyah. **Riset Foto:** Arief Hidayat. **Surabaya:** Amrozi Amenan. **Sekretariat Redaksi:** Chandra Wijayanti (Kepala), Fransiscus Chrisnanto Nugroho, **Litbang:** Alam Surawijaya. **Produksi:** Gianto (Kepala), Sukadi, Agustinus W. Trwibowo, R. Thoitt Tri Adiwanto. **Desain Grafis:** Rochadi Kusmabrata. **Advertising:** Sri Rejeki Listyorini (Deputy Director), Djemmy Piether (General Manager), Arifan Damawan (Manajer Display), Enny Wulandari, Hery Suhaery. **Marcomm & Event Management:** Sari Ostomo (Genera Manager), Herry Wardiyanto (Manager), Budiman Mulyadi (Event Office), **Circulation:** Amson Nainggolan, **Finance:** Anna Gertruida. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: iklan.investordaily@ttnvestor.co.id, Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A, Lantai 1, Jl. Garnisun Dalam No. 8, Karet, Semanggi, Telp. (021) 2995 7500, 2995 7555 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 60.000/mmk, FC Rp 70.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/ RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 10%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. .217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.01003640007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Percetakan: PT. Gramedia. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: koraninvestor@investor.co.id. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.